

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. 2015. *Hukum Notaris Indonesia Tematik Terhadap UU.No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2014. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2012. *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. ke-2*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Enpiris dan Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Harahap, M.Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). 2017. *Kode Etik IPPAT*. Bandung: IPPAT Pengurus Daerah Jakarta Barat.
- Kadir, Abdul. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum terjemahan Raisul Mutaqien*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia
- Luthfi, Khabib. 2018. *Masyarakat Indonesia dan Tanggung jawab Moralitas, (Analsis, Teori dan Perspektif Perkembangan Moralitas di Masyarakat)*. Jakarta: Guepedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Penelitian Hukum*. Bandung: PT.

Citra Aditya.

_____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Jual Beli*. Jakarta: Raja Grafindo.

Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and studies of bussines law.

Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

RAS, Redaksi. 2009. *Tip Hukum Praktis Tanah dan Bangunan*. Depok : Raih Asa Sukses.

Ridwan H.R., 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers,

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Aditya Bhakti.

_____. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Thamrin, Husni. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Pressindo.

Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. 2017. *Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 195.

B. Putusan

Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor, 681 K /Pdt/ 2017*.

C. Jurnal

Fakultas Hukum Tarumanagara. *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor: 23-PD/FH-UNTAR/III/2014 tentang Skripsi*, (Jakarta: FH Untar, 2014).

Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) *Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid* Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 47.

Vivin Pomantow. “Akibat Hukum Terhadap Akte Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPer”, *Jurnal LexPrivatum*. Vol.VI/No.7/Sept/2018.

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN); (LNRI Tahun 2014 No. 3; TLNRI No. 5491), Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PP 37/1998), Pasal 1 Ayat (1), jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PP 24/2016).

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 tentang Kode Etik IPPAT .

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

E. Pendapat Notaris dan PPAT

Sabrina, Notaris dan PPAT, Jakarta Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

Benny Djaja, Notaris dan PPAT, Jakarta Barat, Tanggal 5 Juni 2020.

Kiki Hertanto, Ketua Pemda IPAD, Jakarta Barat, Tanggal 13 Juni 2020.

Endang Sri Kawuryan, Notaris dan PPAT, Jakarta, 14 Juni 2020.